

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengolahan, pengujian, dan analisis data yang telah dilakukan tentang pengaruh penyelenggaraan *good governance*, penerapan *e-budgeting*, dan pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah, diperoleh bukti empiris dan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan *good governance* (X1) memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah di Kota Surabaya (Y).
2. Penerapan *e-budgeting* (X2) memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah di Kota Surabaya (Y).
3. Pengendalian internal (X3) memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah di Kota Surabaya (Y).

5.2. Saran

Adapun saran dari penelitian ini guna menjadi lebih baik dalam pengembangan pengetahuan dan penelitian selanjutnya, terdapat saran sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah daerah kota Surabaya dapat meningkatkan prinsip *good governance* sebagai aspek dalam berorganisasi dan menyelesaikan segala tugas demi tercapainya tujuan organisasi. Kemudian, dapat terus mengoptimalkan tahapan penyusunan anggaran berbasis *e-budgeting* dan juga efektivitas pengendalian internal guna tercapainya konsistensi capaian

peredikat sangat baik pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Surabaya.

2. Peneliti selanjutnya diharapkan untuk memperluas sampel penelitian. Tidak hanya sebatas Badan dan Dinas, tetapi mencakup seluruh perangkat daerah di Kota Surabaya agar mendapatkan hasil yang lebih akurat. Peneliti selanjutnya disarankan juga untuk memperluas sampel penelitian dengan tidak hanya dari aparat internal pemerintah, melainkan dapat mengambil sampel dari pihak publik (masyarakat) sehingga hasil yang diperoleh akan lebih akurat dari dua sudut pandang yang berbeda.
3. Peneliti selanjutnya diharapkan untuk menambahkan variabel-variabel lain yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah seperti standar akuntansi keuangan, sumber daya manusia, dan peran auditor ataupun variabel kontrol serta moderasi lainnya.

5.3. Keterbatasan dan Implikasi Penelitian

5.3.1. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki keterbatasan yang dapat digunakan sebagai perbaikan bagi peneliti selanjutnya. Adapun beberapa keterbatasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil data yang diperoleh hanya hipotesis pertama yang ditolak, hal ini mungkin disebabkan karena kuesioner yang disebarkan diperoleh dari penelitian terdahulu yang dikembangkan sendiri oleh peneliti sehingga kemungkinan besar pernyataan yang diberikan kepada responden sulit dipahami oleh responden sehingga jawaban atau data

yang dihasilkan masih bervariasi atau memiliki varian data yang cukup ekstrim.

2. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini hanya menggunakan kuesioner, karena jawaban yang dihasilkan dari kuesioner dapat menimbulkan bias dikarenakan komunikasi antara peneliti dengan responden hanya terbatas berdasarkan kuesioner saja.
3. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini hanya berdasarkan satu sudut pandang yaitu menggunakan aparat internal pemerintah daerah sebagai responden. Dengan demikian, hasil penelitian ini belum tentu mencerminkan keadaan sebenarnya yang dialami oleh masyarakat terkait penilaian mengenai variabel terkait yang berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
4. Terdapat beberapa perangkat daerah yang tidak mengembalikan paket kuesioner secara lengkap yang telah disebar, hal ini membuat penelitian ini menjadi kurang maksimal, sehingga data yang diperoleh juga masih belum maksimal.

5.3.2. Implikasi Penelitian

1. Berdasarkan hasil penelitian bahwa tidak berpengaruhnya variabel penyelenggaraan *good governance* terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Surabaya, diharapkan tiap Perangkat Daerah dapat meningkatkan prinsip *good governance* sebagai aspek dalam berorganisasi dan menyelesaikan segala tugas demi tercapainya tujuan organisasi.

2. Berpengaruhnya variabel penerapan *e-budgeting* dan pengendalian internal mempengaruhi kualitas LKPD yang berimplikasi secara praktis kepada Pemerintah Daerah dalam melakukan perbaikan dalam pengelolaan keuangan daerah serta kualitas pelaporan keuangan daerah. Diharapkan tiap perangkat daerah agar terus dapat mengoptimalkan tahapan penyusunan anggaran berbasis *e-budgeting* dan juga efektivitas pengendalian internal.
3. Pemerintah Daerah diharapkan agar dapat meningkatkan kapasitas SDM yang terlibat secara aktif dalam tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) maupun sehingga proses *e-budgeting* dapat berjalan dengan baik dan prinsip *good governance* dapat berjalan serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
4. Pemerintah Daerah juga diharapkan mampu membuat suatu regulasi yang tepat sehingga mampu mengoptimalkan pemanfaatan sistem teknologi informasi yang sudah ada dalam setiap prosedur pelaksanaan program dan kegiatan evaluasi di lingkup entitas tiap perangkat daerah. Dengan menggunakan sistem teknologi informasi terpadu, maka akan ada kolaborasi positif antara pemerintah dengan masyarakat.